

**Resepsi Berita Pemakzulan Presiden Jokowi pada Portal Berita
Tempo.co**

Anatia Simamora, Syifa Syarifah Alamiyah
Universitas Pembangunan “Veteran” Jawa Timur
anatiasims@gmail.com

ABSTRACT

This study examines readers' reception of news regarding the impeachment of President Jokowi on the Tempo.co news portal. In its reporting, Tempo presents various opinions and statements from both supporters and opponents of the impeachment issue, as well as public reactions to the matter. Mass media plays a crucial role in shaping public opinion; however, reception analysis shows that the meaning-making process by the audience is influenced by various contextual factors. The aim of this research is to understand how readers receive news about President Jokowi's impeachment on Tempo.co. The methodology employed is qualitative descriptive, with data collected through in-depth interviews. The findings indicate that nearly all readers believe Tempo is not neutral in its reporting on Jokowi's impeachment. In reception analysis, Stuart Hall categorizes readers' acceptance into three positions; however, regarding the reception of news on Jokowi's impeachment in Tempo, only two positions were identified, with the majority of readers occupying a dominant hegemonic position.

Keywords: Reception, Audience, Jokowi Impeachment, Mass Media, Tempo

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji penerimaan pembaca terhadap berita pemakzulan Presiden Jokowi di portal berita Tempo.co. Dalam pemberitaannya, Tempo menyampaikan berbagai pendapat dan pernyataan dari pihak-pihak yang mendukung maupun menolak isu pemakzulan, serta reaksi masyarakat terhadap isu tersebut. Media massa memiliki peran penting dalam membentuk opini publik, namun analisis resepsi menunjukkan bahwa proses pemaknaan oleh khalayak dipengaruhi oleh berbagai faktor kontekstual. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana pembaca menerima pemberitaan tentang pemakzulan Presiden Jokowi di Tempo.co. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hampir semua pembaca beranggapan bahwa Tempo tidak bersikap netral dalam pemberitaan mengenai pemakzulan Jokowi. Dalam analisis resepsi, Stuart Hall membagi posisi penerimaan pembaca menjadi tiga kategori, tetapi terkait penerimaan terhadap berita pemakzulan Jokowi di Tempo, hanya ditemukan dua posisi. Dengan mayoritas pembaca berada pada posisi dominan hegemoni.

Kata Kunci: Resepsi, Khalayak, Pemakzulan Jokowi, Media Massa, Tempo

PENDAHULUAN

Media massa memainkan peran penting dalam menyediakan informasi terkini dan mendalam mengenai suatu isu serta implikasinya bagi pemerintahan dan masyarakat. Isu pemakzulan terhadap presiden Jokowi muncul menjelang Pemilu

2024. Pemakzulan (*Impeachment*) sendiri berasal dari kata “makzul” yang berarti berhenti memegang jabatan atau turun takhta. Merujuk dari KBBI, memakzulkan adalah menurunkan dari takhta atau memberhentikan dari jabatan. Di Indonesia, *impeachment* diartikan sebagai langkah untuk memberhentikan Presiden dari jabatannya oleh lembaga legislatif (DPR) karena adanya pelanggaran hukum yang spesifik (Satriya, 2022).

Adanya isu pemakzulan presiden tentunya dapat menciptakan keadaan politik yang tidak stabil dan mempengaruhi kepercayaan publik terhadap pemerintah. Oleh karena itu, media massa perlu terus memantau dan memberikan liputan yang akurat dan berimbang tentang perkembangan pemakzulan, termasuk alasan-alasan di baliknya, proses hukum yang terlibat, serta reaksi dan opini dari berbagai pihak. Hal ini dikarenakan media massa merupakan acuan bagi masyarakat dalam menilai suatu fenomena bahkan sosok atau individu tertentu. Melalui media massa, individu diberikan akses terhadap beragam informasi yang menjadi pijakan utama bagi mereka dalam membentuk pemahaman, apresiasi, dan justifikasi terhadap berbagai tindakan (Silvani et al., 2021).

Informasi yang disampaikan melalui media massa tidak hanya memengaruhi persepsi dan pandangan individu, tetapi juga memengaruhi langkah-langkah yang mereka ambil dalam kehidupan sehari-hari (Silvani et al., 2021). Meskipun media massa masih menjadi acuan bagi publik untuk menilai suatu fenomena, pembaca dalam hal ini juga memiliki kemampuan untuk secara bebas menciptakan makna dan bertindak sesuai interpretasi yang mereka buat terhadap teks media (Purnamasari, 2018). Fenomena tersebut menunjukkan bahwasanya pembaca sebagai khalayak terlibat tidak secara pasif melainkan aktif dalam menentukan makna dari sebuah pesan media. Pesan media sendiri selalu terbuka dan polisemi (memiliki banyak arti) sehingga dapat interpretasikan berbeda tergantung konteks dan budaya penerima (khalayak). Hal ini menggambarkan bagaimana pemaknaan pesan media tidaklah statis, melainkan tergantung pada refleksi individu terhadap pesan yang diterimanya. Hal inilah yang coba dijelaskan dan ditelaah melalui analisis resepsi.

Berbagai pemberitaan tentang upaya dan wacana pemakzulan Presiden yang ada telah menjadi sumber polemik yang memicu beragam opini dari masyarakat. Polemik ini menyebabkan munculnya berbagai pendapat yang bertentangan. Sebagian masyarakat merasa bahwa upaya pemakzulan ini hanyalah strategi pengalihan perhatian yang dilakukan untuk mendukung kandidat paslon lain, terutama karena hal ini dilakukan menjelang Pemilu 2024. Seperti yang diungkapkan oleh mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Jimly Asshiddiqie, melalui akun X-nya (CNN Indonesia, 2024). Dukungan mengenai wacana pemakzulan juga banyak terutama terlihat dari gerakan demo yang dilakukan oleh kalangan mahasiswa sebagai respons terhadap hal tersebut.

Wacana pemakzulan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) muncul pertama kali ketika mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana, mengirim surat terbuka kepada DPR RI pada Juni 2023 melalui akun Twitternya

(Tempo.co, 2024). Isu pemakzulan Jokowi kemudian naik kembali di tahun 2024, setelah sejumlah tokoh dan perwakilan masyarakat sipil yang menyebut diri sebagai "Petisi 100, Penegak Daulat Rakyat" mengunjungi Menkopolhukam Mahfud Md. Pertemuan tersebut berlangsung di Kantor Kemenko Polhukam di Jakarta pada Selasa, 9 Januari 2024. Mereka meminta Mahfud untuk memakzulkan Jokowi sebelum Pemilu 2024. Beberapa dugaan pelanggaran konstitusi oleh Presiden yang dilaporkan di antaranya terkait dengan adanya nepotisme dalam Mahkamah Konstitusi (MK), intervensi lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Dewan Pengawas KPK melalui revisi Undang-Undang KPK, penerbitan Perpres No. 54 Tahun 2020 tentang APBN yang seharusnya dibahas dan mendapat persetujuan DPR, dan menerbitkan Perpu Cipta Kerja dengan mengesampingkan perintah dari putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 yang inkonstitusional bersyarat (Detik News, 2024).

Salah satu media besar yang rutin memberitakan isu pemakzulan Jokowi adalah Tempo. Tempo merupakan salah satu media berita yang terkenal di Indonesia, menduduki posisi yang penting sebagai media oposisi. Dikenal dengan jurnalisme kritis dan investigatifnya, Tempo sering mengambil peran sebagai pengawas pemerintah dan penjaga kebebasan pers. Sejarahnya yang panjang, termasuk dua kali mengalami pemeretelan selama era Orde Baru, mencerminkan betapa seringnya mereka menghadapi tekanan politik akibat pemberitaannya yang tidak kompromi terhadap kebenaran (Tempo.co, n.d.). Perkembangan teknologi berperan dalam memodernisasi media massa konvensional yang sebelumnya sangat bergantung pada manusia untuk memperoleh informasi dan hiburan. Saat ini, media konvensional seperti koran, radio, dan televisi telah berintegrasi ke dalam dunia digital dan hadir dalam format yang sesuai dengan kemajuan teknologi, yaitu media *online* (Alamiyah, 2024). Dengan berkembangnya teknologi digital, Tempo bertransformasi menjadi media *online* berupa portal berita yang dikenal dengan nama Tempo Interaktif, sebelum kemudian menjadi Tempo.co pada akhir 2011. Dengan berbagai inovasi ini, Tempo telah menjadi salah satu merek media yang dipercaya di Indonesia. Bahkan, menurut survei Reuters Institute yang berjudul Digital Report 2023, Tempo menempati peringkat keenam dari lima belas media massa *online*.

Tempo telah menjadi salah satu pelopor dalam menghadirkan isu-isu penting ke ruang publik Indonesia. Dengan terus menawarkan perspektif alternatif dan memperluas diskursus, Tempo memainkan peran penting dalam mengawasi dan mengkritisi kebijakan pemerintah demi kepentingan masyarakat. Sikap kritis ini, bagaimanapun, bisa memengaruhi cara media mengonstruksi berita. Khususnya dalam konteks pemakzulan Presiden Jokowi, Tempo.co dan media lainnya tentu akan memilih perspektif serta cara penyampaian yang berbeda. Hasil dari konstruksi berita tersebut tentunya akan menimbulkan dampak yang bervariasi tergantung pada individu yang menerima informasi. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk menganalisis bagaimana pembaca menerima pemberitaan mengenai pemakzulan Presiden Jokowi di portal berita *online* Tempo.co.

Analisis resepsi terhadap berita pernah dilakukan sebelumnya, salah satunya seperti dalam penelitian berjudul "Resepsi Pembaca Terkait Berita Demo 4/11 di

Kompas. Com” yang ditulis oleh Purnamasari pada tahun 2018. Berdasarkan penelitian tersebut terkandung konsep penting bahwa makna teks tidak melekat pada teks media, melainkan diciptakan dalam interaksi antara khalayak dengan teks. Penelitian ini sekaligus menunjukkan bahwa pengalaman dan pengetahuan pribadi serta kebiasaan bermedia yang diikuti dengan literasi media yang baik mempengaruhi pemaknaan mereka. Hal serupa diperkuat oleh hasil penelitian berjudul “Analisis Resepsi Khalayak Terhadap Berita kasus Meiliana Di Media Online” yang ditulis oleh Santoso pada tahun 2021 yang menunjukkan bahwa faktor-faktor kontekstual mempengaruhi penerimaan khalayak terhadap teks media.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan teori analisis resepsi Stuart Hall dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana penerimaan pembaca terhadap berita pemakzulan Jokowi yang ada pada portal berita Tempo.co. Stuart Hall mengembangkan paradigma *encoding-decoding* yang memiliki anggapan bahwa khalayak secara aktif melakukan konstruksi dan interpretasi makna terhadap apa yang mereka baca, lihat dan dengar (Dixon, 2019). Analisis resepsi memusatkan perhatian pada individu dalam proses komunikasi massa (*decoding*), yang mencakup pemaknaan dan pemahaman yang lebih dalam terhadap teks media serta bagaimana individu menginterpretasikan konten media. Menurut Moleong (dalam Arikunto, 2021), sumber data penelitian kualitatif adalah tampilan yang berupa kata-kata lisan atau tertulis yang dicermati oleh peneliti, dan benda-benda yang diamati sampai detailnya agar dapat ditangkap makna yang tersirat dalam dokumen atau bendanya. Dengan teknik *purposive sampling* dalam penentuan informan, peneliti memperoleh 8 orang pembaca dengan beragam latar belakang sebagai subjek penelitian. Objek dalam penelitian ini adalah berita mengenai Pemakzulan Presiden Jokowi pada Tempo.co.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pandangan Pembaca terhadap Isu Pemakzulan Jokowi

Isu Pemakzulan Jokowi Inkonstitusional dan Keributan Politik yang Tidak Perlu

Pemberitaan mengenai pemakzulan Presiden Jokowi muncul sejak tahun 2023, lalu memanas kembali di awal tahun 2024 sampai beberapa saat setelah Pemilu. Dalam pemberitaan Tempo, tanggapan tokoh-tokoh yang kontra terhadap pemakzulan Jokowi diberitakan. Yusril Ihza selaku ahli tata negara dan berasal dari partai yang mendukung Prabowo menyebut wacana tersebut Inkonstitusional dan merupakan sebuah gerakan yang mengancam keberlangsungan Pemilu. Luhut Panjaitan juga menyebut wacana ini merupakan keributan politik yang tak perlu.

Menanggapi hal tersebut, Informan 1 percaya bahwa masalah atau isu yang sedang dibahas terkait pemakzulan memang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip

konstitusi (inkonstitusional). Hal ini menunjukkan bahwa proses pemakzulan atau situasi yang menyebabkan pemakzulan tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Menurutnya, pemakzulan adalah sesuatu yang buruk atau negatif dalam konteks pemerintahan. Informan 1 khawatir bahwa jika pemakzulan terjadi, itu akan menimbulkan ketidakstabilan dan membuat negara tidak berfungsi dengan baik.

“Menurut saya benar bahwa ini merupakan isu yang tidak sesuai konstitusi, karena jika terjadi Pemakzulan merupakan suatu hal yang tidak baik dan negatif di pemerintahan kita. Negara akan menjadi tidak baik-baik saja, berjalan tidak seimbang. Dengan adanya isu ini bahkan jika sampai terjadi benaran akan membuat negara kacau, seperti tahun 98, kemungkinan. Kita tidak akan tahu.” (Informan 1, mahasiswa, 22 tahun)

Memiliki pandangan yang sama dengan Informan 1, Informan 3 menyebutkan bahwa seruan pemakzulan presiden datang dari pihak yang kalah dalam pemilu atau dalam konteks politik. Dia melihat kritik ini sebagai reaksi dari mereka yang tidak puas dengan hasil Pemilu tersebut. Informan 4 dan 7 juga percaya bahwa tindakan ini tampaknya hanya untuk memicu keributan dan kekacauan, daripada menyelesaikan masalah secara konstruktif. Informan 4 lebih lanjut menjelaskan bahwa proses yang dilakukan dalam wacana pemakzulan Jokowi tidak sesuai dengan konstitusi. Ia menilai bahwa langkah yang diambil, yaitu langsung menghadap Mahfud (saat itu merupakan Menkopolkam) tanpa melalui prosedur yang benar di DPR dan MK (Mahkamah Konstitusi), melanggar tata cara yang seharusnya diikuti. Di sisi lain ada Informan 6 yang setuju dan berpendapat bahwa isu pemakzulan dianggap inkonstitusional, namun menolak pendapat bahwa isu ini tidak penting. Dia berargumen bahwa selama suatu isu berhubungan dengan pemerintahan, maka isu tersebut tetap penting.

Pemakzulan Presiden Jokowi Merupakan Wacana yang Perlu Dilakukan Akibat Kemunduran dalam Pemerintahan

Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti memiliki pandangan yang berbeda dengan pihak yang kontra wacana pemakzulan Jokowi. Beliau menguraikan unsur-unsur pemakzulan yang dapat dikenakan kepada Presiden Jokowi berupa kemunduran dalam pemerintahan beliau, termasuk tanggapan kontroversial Jokowi yang menyatakan bahwa Presiden boleh berkampanye dalam Pemilu. Demo mahasiswa dalam hal ini juga menyuarakan tuntutan untuk memakzulkan Presiden Jokowi, dengan menyebutkan sejumlah isu berupa kecurangan pemilu, korupsi, kolusi dan nepotisme, agraria, monopoli sumber daya alam, lingkungan, biaya pendidikan dan kesehatan yang mahal, kebebasan sipil, keadilan ekonomi dan gender, kekerasan aparat dan produk hukum bermasalah.

Informan 5 setuju mengenai dugaan kemunduran yang terjadi di pemerintahan Jokowi. Informan 5 menganggap bahwa kemunduran yang dirasakan dalam pemerintahan Jokowi adalah hasil dari analisis mendalam oleh para ahli yang mengidentifikasi berbagai masalah serius yang mempengaruhi demokrasi di

Indonesia. Analisis ini mencakup berbagai faktor, seperti penyalahgunaan bantuan sosial (bansos), kecurangan dalam Pemilu, nepotisme, dan masalah-masalah demokrasi lainnya. Hasil analisis inilah yang telah memicu kemarahan di kalangan mahasiswa dan masyarakat, yang kemudian mendorong para akademisi untuk menyampaikan tuntutan. Hal ini mencerminkan kekhawatiran mendalam terhadap kemunduran demokrasi yang dianggap sebagai dampak dari praktik-praktik buruk dalam pemerintahan.

Informan 8 dan 2 menilai bahwa kemunduran dalam pemerintahan Jokowi terutama terlihat dari cara undang-undang dibentuk dan diberlakukan. Ia merasa bahwa beberapa UU dikeluarkan secara mendadak dan tanpa melibatkan partisipasi atau masukan dari masyarakat secara memadai.

“Menurutku iya dari pembentukan dan pemberlakuan UU yang tiba-tiba tanpa campur tangan masyarakat. Kayak tiba-tiba kita ya harus nerima doang. Disitu sih yang kemundurannya.” (Informan 8, mahasiswi, 22 tahun)

Penerimaan Pembaca Terhadap Isu Pemakzulan Jokowi

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap 8 Informan, ditemukan berbagai pandangan dan penerimaan terhadap isu Pemakzulan Presiden Jokowi. Dalam posisi *dominan hegemonic*, yang mana setuju terhadap wacana pemakzulan Jokowi terdapat 3 Informan, yaitu Informan 2, 5 dan 8. Informan 2 secara tegas menyikapi isu ini sebagai sebuah isu yang harus dikawal dan ditegakkan, karena ia percaya dalam hal ini Presiden Jokowi jelas-jelas bersalah atas intervensi yang ia lakukan dalam Pemilu.

Informan 5 yang juga merupakan mahasiswa hukum, memiliki pengalaman bergerak aktif dalam penegakan keadilan terhadap isu-isu sosial yang terjadi (demonstrasi), juga memiliki pandangan yang serupa bahwa isu ini adalah wacana yang perlu dilakukan.

Meskipun Informan 8 memiliki latar belakang yang berbeda dengan Informan 2 dan 5, ia juga setuju terhadap wacana pemakzulan ini. Informan 8 melihat bahwa isu ini merupakan sebuah konsekuensi yang harus diterima dan dijalankan oleh Presiden Jokowi, oleh sebab keberpihakan yang ia lakukan dan juga karena kebijakan yang ia lakukan sendiri tanpa persetujuan masyarakat Indonesia.

Dalam posisi *negotiated* adalah Informan 1. Informan 1 adalah satu-satunya Informan yang menerima secara terbuka pro dan kontra yang terjadi dan yang menjadi dugaan terhadap isu Pemakzulan Jokowi. Ia mengaku netral terhadap isu ini dimana ia tidak mau menempatkan posisinya apakah ia setuju atau tidak setuju. Secara keseluruhan ia merasa bahwa isu ini wajar terjadi di akhir pemerintahan dan di masa-masa Pemilu.

Di posisi *oppositional*, yang mana menolak secara tegas wacana pemakzulan ini adalah Informan 3, 4, 6 dan 7. Informan 3 sejak awal memiliki pandangan tidak suka terhadap adanya isu ini. Ia menilai isu ini membuat keributan dan kericuhan di

tengah-tengah masyarakat. Informan 4 juga melihat isu ini sebagai sebuah tuduhan tak berdasar yang dilayangkan oleh lawan politik paslon 02, untuk menjatuhkan kredibilitas pasangan tersebut. Informan 7 yang mengaku memiliki sikap menghargai dan menyukai kepemimpinan Presiden Jokowi juga merasa isu ini tidak relevan. Sementara itu Informan 6 mengaku tidak melihat ada faktor-faktor yang dapat mendasari pemakzulan Jokowi.

Penerimaan Pembaca Terhadap Berita Pemakzulan Jokowi Pada Tempo.co

Hall menjelaskan bahwa *encoding* media membantu kita memahami bagaimana produk media memengaruhi audiens. Namun, hanya mempelajari *encoding* tidak cukup untuk menjelaskan bagaimana media menciptakan makna. Produk mungkin mengkodekan makna, tetapi audiens tidak selalu memahami makna tersebut dengan cara yang sama. Hall juga berpendapat bahwa *decoding* media tidaklah mudah. Media menghasilkan berbagai cara pembacaan karena media biasanya menggunakan tanda visual (Dixon, 2019).

Berdasarkan hasil wawancara, ditemukan bahwa semua informan menyadari bahwa Tempo adalah media berita yang kritis terhadap Pemerintah. Banyak yang setuju bahwa keberadaan media yang kritis terhadap pemerintah penting untuk menyuarakan keresahan masyarakat atau sebagai bentuk pengawasan terhadap pemerintah. Namun, terkait media Tempo, ada beberapa orang yang tidak sepenuhnya setuju karena khawatir bahwa konstruksi opini media Tempo dapat menimbulkan ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Sebagian besar informan tetap menganggap media ini cukup kredibel. Namun, beberapa informan mengakui bahwa sikap kritis Tempo dapat mempengaruhi objektivitasnya dalam menyajikan berita.

Informan 1, 2, 5, 6, dan juga informan 8 berada pada posisi *dominan hegemonic*. Informan 1 memiliki pandangan bahwa keberpihakan yang dilakukan media itu wajar dan merupakan hak suatu media. Pandangan ini membuatnya merasa bahwa berita Tempo, meskipun sepertinya pro terhadap isu pemakzulan, tetap merupakan informasi yang kredibel. Sementara itu informan 2 dan 5 memiliki pandangan yang serupa bahwa mereka justru mendukung Tempo yang pemberitaannya terkait isu ini kritis dan berpihak. Hal ini dipengaruhi oleh posisi kedua informan yang memang pro terhadap isu pemakzulan presiden tersebut.

Informan 6 dan Informan 8 juga memiliki kesamaan dalam penerimaan terhadap berita Tempo. Mereka tidak merasa media ini tidak objektif atau condong ke arah pihak-pihak tertentu, sehingga mereka dapat menerima sepenuhnya berita Tempo. Menurut mereka, dengan media ini memberitakan pro dan kontra yang ada sudah cukup membuktikan media ini netral, terlepas perbedaan jumlah berita ataupun cara media ini mengemas pemberitaannya.

Informan 3, 4 dan 7 berada pada posisi *oppositional*. Ketiga Informan sepakat bahwa sikap kritis media Tempo menjadikan media ini tidak netral dalam pemberitaannya mengenai isu pemakzulan presiden. Hal ini membuat mereka

merasa bahwa berita Tempo menjadi tidak dapat dipercaya. Informan 3 sejak awal memiliki pandangan bahwa Tempo merupakan media yang idealis dan keberpihakan. Ia mengaku tidak menyukai cara Tempo memberitakan suatu isu yang membuat persepsi publik menjadi jelek terhadap pemerintah. Informan 4 yang memiliki pengalaman sebelumnya menonton video Luhut yang menjadi objek pemberitaan Tempo, melihat perbedaan persepsi terhadap apa yang diberitakan oleh media tersebut. Oleh sebab itu ia merasa media ini tidak dapat dipercaya dalam pemberitaan mengenai isu pemakzulan Jokowi. Sementara itu, Informan 7 menyimpulkan Tempo sebagai media yang oposisi dan berusaha mencari kekurangan pemerintah. Dia merasa sikap Tempo yang seperti itu dapat mempengaruhi kepercayaan publik terhadap pemerintah dan membuat publik enggan mengikuti kebijakan pemerintah.

KESIMPULAN

Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa pengalaman pribadi, pengetahuan, latar belakang sosial budaya, dan konsumsi media memengaruhi cara individu memaknai suatu isu dan pesan yang disampaikan. Terdapat berbagai interpretasi dan reaksi terhadap berita pemakzulan Presiden Jokowi. Sebagian pembaca menolak wacana pemakzulan tersebut, dengan pandangan bahwa itu inkonstitusional dan hanya merupakan keributan politik yang tidak perlu. Pandangan ini umumnya berasal dari pembaca yang kurang mengikuti isu politik dan lebih cenderung mendukung pemerintah. Di sisi lain, ada juga pembaca yang menganggap isu pemakzulan sebagai representasi suara masyarakat yang harus diperhatikan, sebagai respons terhadap kemunduran dalam pemerintahan Jokowi. Pandangan ini terutama berasal dari mahasiswa yang aktif dalam organisasi kemahasiswaan.

Hampir semua pembaca beranggapan bahwa Tempo tidak bersikap netral dalam pemberitaan mengenai pemakzulan Jokowi. Dalam analisis resepsi, Stuart Hall membagi posisi penerimaan pembaca menjadi tiga kategori, tetapi terkait penerimaan terhadap berita pemakzulan Jokowi di Tempo, hanya ditemukan dua posisi. Mayoritas pembaca berada pada posisi dominan hegemonik, yang sepenuhnya menerima pesan dari Tempo, sementara sebagian kecil berada pada posisi oposisi, menolak pesan berita pemakzulan Jokowi dari Tempo.

DAFTAR PUSTAKA

Alamiyah, S. S. (2024). *Sensualitas Dalam Konten “Youtube’s Got Talent” Pada Channel SkinnyIndonesia24*. 4(1), 167–185.

Arikunto, S. (2021). *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta.

CNN Indonesia. (2024). *Awal Mula Wacana Pemakzulan Jokowi dan Pro-Kontra Publik*.
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240115115856-32-1049600/awal-mula-wacana-pemakzulan-jokowi-dan-pro-kontra-publik>

Detik News. (2024). *Menyikapi Isu Pemakzulan Presiden*.
<https://news.detik.com/kolom/d-7166497/menyikapi-isu-pemakzulan->

presiden

- Dixon, M. (2019). Media Theory for A Level. In *Media Theory for A Level*. Taylor & Francis Group. <https://doi.org/10.4324/9780429032240>
- Purnamasari, N. I. (2018). Resepsi Pembaca terkait Berita Demo 4/11 di Kompas.com. *Jurnal ASPIKOM*, 3(5), 958. <https://doi.org/10.24329/aspikom.v3i5.358>
- Santoso, S. (2021). Analisis Resepsi Audiens Terhadap Berita Kasus Meiliana di Media Online. *Komuniti : Jurnal Komunikasi Dan Teknologi Informasi*, 12(2), 140–154. <https://doi.org/10.23917/komuniti.v12i2.13285>
- Satriya, C. A. (2022). Karakteristik Pemakzulan Presiden di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 19(3), 528–553. <https://doi.org/10.31078/jk1932>
- Silvani, I., Perwirawati, E., & Simbolon, B. R. (2021). Manajemen Media Massa. In *Scopindo Media Pustaka*.
- Tempo.co. (n.d.). *Tempo Media Group Sejarah Singkat Filosofi Tempo*. Retrieved May 11, 2024, from <https://www.tempo.id/corporate.php>
- Tempo.co. (2024). *Kronologi Munculnya Wacana Pemakzulan Jokowi*. 2. https://nasional.tempo.co/read/1821974/kronologi-munculnya-wacana-pemakzulan-jokowi?page_num=2